

modal pada perusahaan daerah (Perusda) dan PT. Bank Pembangunan Kalteng yang ada di Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 3.8
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2010 - 2013

Uraian	2010	2011	2012	2013
Pajak Daerah	77,62	74,00	79,49	81,69
Retribusi Daerah	53,02	94,24	132,05	112,52
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	99,04	121,88	119,08	89,55
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	95,32	84,76	88,65	37,18
Pendapatan Asli Daerah	77,13	89,49	97,21	66,16

Sumber :DPKA Kab. Gumas, 2014

Realisasi Retribusi daerah pada tahun 2010 hanya sebesar 53,02persen dan tahun 2011 hanya 94,24 persen, hal tersebut disebabkan oleh masih belum tercapainya target pada retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu, sedangkan realisasi pada tahun 2012 dan 2013terjadi kenaikan cukup tajam dan melebihi target yaitu 132,05persen dan 112,52 persen. Hal tersebut disebabkan oleh telah adanya kerangka regulasi hukum tentang peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 3.9
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2010-2013

Uraian	2010-2011	2011-2012	2012-2013
Pajak Daerah	4,6	25,2	57,6
Retribusi Daerah	10,8	16,7	35,6
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	65,9	21,3	17,7
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9,1	65,1	(76,3)
Pendapatan Asli Daerah	16,3	7,11	13,5

Sumber :Hasil analisis, diolah dari berbagai sumber, 2014

Pertumbuhan pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi selama tahun 2010 - 2013. Hal ini terlihat dari Tabel diatas dimana pertumbuhan pendapatan yang paling rendah yaitu 7,11 persen pada tahun 201 ke tahun

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	M.

2012 kemudian terjadi kenaikan tahun 2012-2013 menjadi 13,5 persen dan meningkat yang paling tinggi pertumbuhannya dari tahun 2010-2011 sebesar 16,3 persen. Data realisasi pendapatan asli daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.10 dibawah ini.

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2010 - 2013

Uraian	Tahun 2010			Tahun 2011		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pendapatan Asli Daerah	17.784.938.284	13.718.150.722,14	77,13	17.647.532.000	15.793.358.675,52	89,49
a. Pajak Daerah	2.747.550.000	2.132.629.462	77,62	3.016.000.000	2.231.699.861	74,00
b. Retribusi Daerah	6.630.870.248	3.515.390.560	53,02	4.133.600.000	3.895.404.495	94,24
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.535.000.000	1.520.285.949,71	99,04	2.070.000.000	2,522,896,531	121,88
d. Lain lain PAD yang sah	6.871.518.000	6.549.844.751,43	95,32	8.427.932.000	7.143.357.788,22	84,76

Uraian	Tahun 2012			Tahun 2013		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pendapatan Asli Daerah	22.826.600.000	22.189.739.348,92	97,21	37.265.500.000	24.653.836.617,10	66,16
a. Pajak Daerah	3.515.000.000	2.794.211.417,10	79,49	8.440.000.000	6.894.921.297,60	81,69
b. Retribusi Daerah	3.441.600.000	4.544.759.194	132,05	6.560.500.000	7.269.485.704,10	112,52
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.570.000.000	3.060.277.107,31	119,08	4.150.000.000	3.716.436.535,38	89,55
d. Lain lain PAD yang sah	13.300.000.000	11.790.491.630,51	88,65	18.215.000.000	6.772.993.080,02	37,18

Sumber: DPKA Kab. Gumus, 2014

B. Dana Perimbangan

Dalam penjelasan UU Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Proporsi dana perimbangan terhadap APBD relatif besar, dimana pada tahun 2010 mencapai 78,93persen, tahun 2011 mencapai 84,28persen, tahun 2012 mencapai 91,08 persen serta tahun 2013 mencapai 85,92persen. Hal ini

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	h.

menunjukkan bahwa Kabupaten Gunung Mas dalam pendanaan daerah masih relatif bergantung pada pemerintah pusat.

Tabel 3.11
Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2010 – 2013

Uraian	2010	2011	2012	2013
Dana Perimbangan	394.469.837.907	452.448.700.958	517.825.943.150	590.840.833.728
a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	46.560.792.907	53.758.927.958	66.228.029.150	64.921.945.728
b. Dana Alokasi Umum (DAU)	312.107.445.000	360.027.473.000	414.880.214.000	476.671.178.000
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	35.801.600.000	38.662.300.000	36.717.700.000	49.247.710.000

Sumber :DPKA Kab. Gumas, 2014

Berdasarkan tabel diatas Dana Perimbangan dari tahun 2010 – 2013 terus meningkat cukup signifikan. Pada tahun 2010 Dana Perimbangan mencapai Rp. 394.469.837.907,-dan pada tahun 2013 mencapai Rp. 590.167.887.827,- Penyumbang terbesar dana perimbangan berasal Dana Alokasi Umum (DAU). Struktur Dana Perimbangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.12
Struktur Dana Perimbangan Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2010 – 2013

Uraian	Struktur (%)			
	2010	2011	2012	2013
Dana bagi hasil pajak & Bukan Pajak	10,55	10,52	12,54	12,92
Dana Alokasi Umum (DAU)	88,46	80,81	80,35	78,92
Dana Alokasi Khusus(DAK)	0,99	8,67	7,11	8,15
Dana Perimbangan	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Hasil analisis, diolah dari berbagai sumber, 2014

Berdasarkan tabel dibawah dari tahun 2010–2012, dana perimbangan terealisasi dengan sempurna artinya selalu melebihi target, kecuali tahun 2013 hanya mencapai 97,83 persen. Dari tahun 2010–2013realisasi dana perimbangan terealisasi dengan rata-rata capaian realisasi sebesar 100,50persen.

KABAG HUKUM	KASJRBAG
<i>f.</i>	<i>u</i>

Tabel 3.13
Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2010 – 2013

Uraian	2010	2011	2012	2013
Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	125,09	114,61	102,32	83,19
Dana Alokasi Umum (DAU)	100,0	99,92	100,0	100,0
Dana Alokasi Khusus (DAK)	100,0	100,0	100,0	100,0
Dana Perimbangan	102,42	101,47	100,29	97,83

Sumber :DPKA Kab. Gumus, 2014

Pertumbuhan dana perimbangan mengalami fluktuatif selama tahun 2010–2013. Hal ini terlihat dari Tabel dibawah dimana pertumbuhan pendapatan melalui Dana Perimbangan pada tahun 2010–2011 mencapai 15,78 persen pada tahun 2011–2012 naik menjadi 15,80 persen. Sementara tahun 2012–2013 terjadi kenaikan menjadi 16,97 persen.

Tabel 3.14
Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2010 – 2013

Uraian	2010-2011	2011-2012	2012-2013	Rata2
Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	25,8	17,0	(0,67)	(2,1)
Dana Alokasi Umum (DAU)	15,45	15,2	13,0	4,4
Dana Alokasi Khusus (DAK)	7,99	-5,03	25,4	8,5
Dana Perimbangan	14,7	14,4	12,3	4,2

Sumber :Hasil analisis, diolah dari berbagai sumber, 2014

Data mengenai realisasi dana perimbangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.15 dibawah ini.

Tabel 3.15
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2010 – 2013

Uraian	Tahun 2010			Tahun 2011		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Dana Perimbangan	385.131.765.209	394.469.837.907	102,42	445.890.010.000	452.448.700.958	101,47
a. Dana bagi hasil pajak & bukan Pajak	37.222.720.209	46.560.792.907	125,09	46.907.090.000	53.758.927.958	114,61
b. Dana Alokasi Umum (DAU)	312.107.445.000	312.107.445.000	100,00	360.320.620.000	360.027.473.000	99,92
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	35.801.600.000	35.801.600.000	100,00	38.662.300.000	38.662.300.000	100,00

Uraian	Tahun 2012			Tahun 2013		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	W

Dana Perimbangan	516.324.863.376	517.825.943.150	100,29	603.960.744.000	590.840.833.728	97,83
a. Dana bagi hasil pajak & bukan Pajak	64.726.949.376	66.228.029.150	102,32	78.041.856.000	64.921.945.728	83,19
b. Dana Alokasi Umum (DAU)	414.880.214.000	414.880.214.000	100,00	476.671.178.000	476.671.178.000	100,00
c. Dana Alokasi Khusus(DAK)	36.717.700.000	36.717.700.000	100,00	49.247.710.000	49.247.710.000	100,00

Sumber :DPKA Kab. Gumas, 2014

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kabupaten Gunung Mas terdiri dari Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya, dan bagi hasil bukan pajak dari provinsi atau pemda lainnya.

Tabel 3.16
Lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2010 - 2013

Uraian	2010	2011	2012	2013
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	50.810.829.208	65.549.730.467	27.712.355.067	61.681.205.120,43
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5.757.046.076	7.487.711.067	7.487.711.067	16.315.917.504,43
b. Penerimaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal (DPDF) dan Percepatan Pembangunan Daerah (PPD)	34.517.959.132	-	-	-
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	72.145.000	-
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	10.385.058.100
e. Penerimaan Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD	6.027.000.000	5.721.000.000	4.614.000.000	6.800.000.000
f. Penerimaan Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	3.508.824.000	6.738.524.400	15.610.644.000	28.180.229.516
g. Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	-	9.236.846.000	-	-
h. Penerimaan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID)	-	24.750.000.000	-	-
i. Penerimaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pendidikan (DPPIP)	1.000.000.000	11.615.649.000	-	-
j. Penerimaan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2)	-	-	-	129.553.000

Sumber :DPKA Kab. Gumas, 2014

Berdasarkan tabel diatas sumber pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah bersifat fluktuatif. Tahun 2010-2011 mengalami peningkatan, namun tahun 2012 terjadi penurunan yang cukup tajam. Tahun 2011, nilai Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

KABAG HUKUM	KASUBAG
f.	M

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan

Rp.65.549.730.467dan terjadi penurunan tahun 2012 menjadi Rp.27.712.355.067,-.Hal tersebut disebabkan oleh fluktuatifnya besaran penerimaan, seperti Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal (DPDF) dan Dana Percepatan Pembangunan Daerah (DPPD) hanya ada di tahun 2010,dan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus hanya masuk pada tahun 2012, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya hanya ada di Tahun 2013, pencatatan penerimaan Dana BOS tidak lagi dicatat sebagai penerimaan dalam APBD Kabupaten setelah tahun 2011.

Tabel 3.17
Struktur Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010-2013

Uraian	Struktur (%)			
	2010	2011	2012	2013
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	11,33	11,42	26,95	26,40
Penerimaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal (DPDF) dan Percepatan Pembangunan Daerah (PPD)	67,93	-	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	0,26	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	16,80
Penerimaan Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD	11,86	8,73	16,61	11,00
Penerimaan Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	6,91	10,28	56,18	45,59
Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	-	14,09	-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID)	-	37,76	-	-
Penerimaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pendidikan (DPPIP)	1,97	17,72	-	-
Penerimaan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2)	-	-	-	0,21
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber :DPKA Kab. Gumas, 2014

Berdasarkan tabel diatas penyumbang terbesar lain-lain pendapatan daerah yang sah setiap tahunnya bervariasi. Pada tahun 2010 penyumbang terbesar Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal (DPDF) dan Dana Percepatan Pembangunan Daerah (DPPD) sebesar 67,93 persen. Sementara tahun 2011 penyumbang terbesar penerimaan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sebesar 37,76 persen. Tahun 2012 dan 2013, penerimaan terbesar dari Penerimaan Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar 56,18 persen dan 45,59 persen. Sedangkan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setiap tahun mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan.

KABAG HUKUM	KASUBAG
b.	M.

Tabel 3.18
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 - 2013

Uraian	2010	2011	2012	2013
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	102,96	102,77	142,46	85,18
Penerimaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal (DPDF) dan Percepatan Pembangunan Daerah (PPD)	100,00	-	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	100,00	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	100,00
Penerimaan Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD	86,96	97,84	100,00	67,21
Penerimaan Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	100,00	86,97	100,00	81,94
Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	-	100,86	-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID)	-	100,00	-	-
Penerimaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pendidikan (DPPIP)	100,00	100,00	-	-
Penerimaan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2)	-	-	-	100,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	98,79	98,91	111,44	84,25

Sumber :DPKA Kab. Gumas, 2014

Berdasarkan tabel diatas, tahun 2010 - 2012realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah masih belum bisa mencapai100 persen lebih, sedangkan di tahun 2012, realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai100 persen lebih disetiap sub sektor pendapatan, sedangkan tahun 2013 mengalami penurunan menjadi hanya 84,25 persen.

Berdasarkan Tabel dibawah, dapat dilihat bahwa Pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak menentu, hal ini disebabkan pada setiap tahun belum tentu pendapatan tersebut muncul kembali, sehingga pertumbuhannya tidak bisa diukur per tahun. Secara keseluruhan, pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 29,01 persen pada tahun 2011, sedangkan pada tahun 2011 ke tahun 2012terjadi penurunan pertumbuhan secara tajam mencapai 57,61 persen, hal ini disebabkan oleh tidak adanya lagi sub sektor pendapatan dari Penerimaan dana BOS, Penerimaan Dana Penyesuaian InfrastrukturDaerah (DPID) serta Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pendidikan (DPPIP). Sedangkan pada tahun 2013 naik secara tajam menjadi 122,46 persen.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	W

Tabel 3.19
Pertumbuhan Lain-lain pendapatan yang sah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 - 2013(dalam persen)

Uraian	2010-	2011-	2012-2013
--------	-------	-------	-----------

	2011	2012	
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	29,8	38,6	23,2
Penerimaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal (DPDF) dan Percepatan Pembangunan Daerah (PPD)	-	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	29,1	(64,5)	(95,4)
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
Penerimaan Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD	(5,08)	(19,35)	47,38
Penerimaan Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	92,05	131,66	80,25
Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	-	-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID)	-	-	-
Penerimaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pendidikan (DPPPI)	-	-	-
Penerimaan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2)	1.061,56	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	29,01	(109,4)	32,9

Sumber : Hasil analisis, diolah dari berbagai sumber, 2014

Data mengenai realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat dilihat pada tabel 3.20 dibawah ini.

Tabel 3.20
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 – 2013

Uraian	2010			2011		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	52.810.829.208	50.195.303.424	98,79	65.549.730.467	64.834.281.330	98,91
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5.757.046.076	5.927.520.292	102,96	7.487.711.067	7.695.116.430	102,77
b. Penerimaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal (DPDF) dan Percepatan Pembangunan Daerah (PPD)	34.517.959.132	34.517.959.132	100,00	-	-	-
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
e. Penerimaan Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD	6.027.000.000	5.241.000.000	86,96	5.721.000.000	5.597.250.000	97,84
f. Penerimaan Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	3.508.824.000	3.508.824.000	100,00	6.738.524.400	5.860.430.400	86,97

KABAG HUKUM	KASUBAG
<i>f.</i>	<i>M.</i>

g.	Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	-	-	-	9.236.846.000	9.315.835.500	100,86
h.	Penerimaan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID)	-	-	-	24.750.000.000	24.750.000.000	100,00
i.	Penerimaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pendidikan (DPPIP)	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	11.615.649.000	11.615.649.000	100,00
j.	Penerimaan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2)	-	-	-	-	-	-

Uraian	2012			2013		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	27.712.355.067	30.963.875.789,36	111,44	65.549.730.467	64.834.281.330	98,91
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	7.487.711.067	10.667.086.789,36	142,46	16.315.917.504,43	7.695.116.430	102,77
b. Penerimaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal (DPDF) dan Percepatan Pembangunan Daerah (PPD)	-	-	-	-	-	-
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	72.145.000	72.145.000	100,00	-	-	-
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemkab Lainnya	-	-	-	10.385.058.100	-	-
e. Penerimaan Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD	4.614.000.000	4.614.000.000	100,00	6.800.000.000	5.597.250.000	97,84
f. Tunjangan Profesi Guru PNSD	15.610.644.000	15.610.644.000	100,00	28.180.229.516	5.860.430.400	86,97
g. Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	-	-	-	-	9.315.835.500	100,86
h. Penerimaan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID)	-	-	-	-	24.750.000.000	100,00
i. Penerimaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	-	-	-	11.615.649.000	100,00

AABAG MIKUM	KASUBBAG
f.	M.

Bidang Pendidikan (DPPIP)						
j. Penerimaan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2)	-	-	-	129.553.000	-	-

Sumber :DPKA Kab. Gumas, 2014

3.1.1.3 Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari program/kegiatan pada setiap PD baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Penggunaan anggaran untuk mendanai program/kegiatan urusan wajib dilakukan dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing PD sedangkan penggunaan anggaran untuk mendanai program/kegiatan urusan pilihan dilakukan melalui pendekatan kinerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

Struktur belanja dalam APBD Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, sebagai berikut:

Belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja modal.

KABAG HUKUM	KASUBAG
<i>f.</i>	<i>M.</i>

Tabel 3.21
Total Belanja Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2010 – 2013

Uraian	2010	2011	2012	2013
Belanja Tidak Langsung	233.834.621.601,98	247.506.136.422,10	295.305.521.745,25	350.361.356.597,17
Belanja Langsung	272.367.975.032,00	341.626.584.785,00	310.578.181.039,00	388.679.412.645,00
Total Belanja	506.202.596.633,98	589.132.721.207,10	605.883.702.784,25	739.040.769.242,17

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan tabel diatas total belanja Kabupaten Gunung Mas tiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 total belanja mencapai Rp. 506.202.569.633,98 dan pada tahun 2013 mencapai Rp. 739.040.769.242,17.



Dari tahun 2010 – 2013 belanja terbesar masih merupakan belanja langsung. Pada tahun 2013 belanja tidak langsung mencapai Rp. 350.361.356.597,17 sedangkan belanja langsung mencapai Rp. 388.679.412.645,-. Nilai belanja langsung dan tidak langsung yang hampir seimbang dikarenakan didalam belanja tidak langsung terdapat belanja untuk pegawai. Pada tahun 2013 proporsi belanja pegawai mencapai 80,29 persen dari total belanja tidak langsung atau 38,06 persen dari total belanja daerah. Sedangkan belanja langsung sebagian besar digunakan untuk belanja modal dan barang jasa. Struktur belanja beserta rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.22
Struktur Belanja langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 – 2013

Uraian	Struktur (persen)			
	2010	2011	2012	2013
a. Belanja Tidak Langsung	46,19	42,01	48,74	47,41
b. Belanja Langsung	53,81	57,99	51,26	52,59
Total Belanja	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas

Realisasi belanja daerah dari tahun 2010–2013 bila dibandingkan dengan anggaran belanja selalu dibawah target, namun terjadi tren peningkatan dalam tiga tahun yaitu tahun 2010–2012. Pada tahun 2010 realiasi total belanja daerah mencapai 88,44 persen sedangkan tahun 2011 naik menjadi 92,49 persen dan tahun 2012 menjadi 94,61 persen serta tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 91,22 persen. Realisasi belanja yang lebih kecil dari anggaran secara umum disebabkan oleh adanya efisiensi belanja serta adanya kegiatan-kegiatan yang tidak diserap tetapi diluncurkan kembali pada tahun berikutnya. Realisasi belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel dibawah ini

KABAG HUMAS	KASUBAG
	

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan

Tabel 3.23
Realisasi Belanja Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2010 – 2013

Uraian	2010	2011	2012	2013
Belanja Tidak Langsung	95,39	96,58	97,33	96,38
Belanja Langsung	82,48	89,53	92,02	86,57
Total Belanja	88,44	92,49	94,61	91,22

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas

Apabila dilihat dari pertumbuhan belanja selama tahun 2010 – 2013 cenderung terjadi fluktuatif. Pertumbuhan Belanja Daerah tahun 2010 – 2011 pertumbuhannya 16,38 persen sedangkan pada tahun 2011 – 2012 terjadi penurunan yaitu hanya 2,84 persen dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2013 sebesar 21,98 persen. Untuk lengkapnya lihat tabel dibawah ini.

Tabel 3.24
Pertumbuhan Belanja Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2010 – 2013

Uraian	2010-2011	2011-2012	2012-2013	Rata2
Belanja Tidak Langsung	12,7	28,9	(20,2)	7,1
Belanja Langsung	40,5	(13,9)	48,3	24,9
Total Belanja	21,7	15,3	14,3	17,1

Sumber : Data diolah, 2014

Rincian pertumbuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.25
Rincian Pertumbuhan Belanja Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2010 – 2013

Uraian	Pertumbuhan (persen)			Rata2 pert
	2010-2011	2011-2012	2012-2013	
a. Belanja Pegawai	15,3	15,0	4,6	11,6
b. Belanja Subsidi	-	-	-	
c. Belanja Hibah	(36,7)	358,8	50,1	124,1
d. Bantuan Sosial	(13,7)	(95,5)	32,1	(25,7)
e. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa	(39,41)	3,1	(223,8)	(86,7)
f. Belanja Tidak Terduga	341,7	897,5	(1.063)	58,7
Belanja Tidak Langsung	12,7	28,9	(20,2)	7,1

KABAG HUKUM	KASUBAG
f.	M.

Uraian	Pertumbuhan (persen)			Rata2 pert
	2010- 2011	2011- 2012	2012- 2013	
a. Belanja Pegawai	21,9	17,3	64,8	34,7
b. Belanja Barang dan Jasa	28,9	7,3	(0,3)	11,9
c. Belanja Modal	40,5	(13,9)	16,2	14,3
Belanja Langsung	36,2	(6,6)	15,7	15,1
Uraian	Pertumbuhan (persen)			Rata2 pert
	2010-2011	2011- 2012	2012-2013	
Pembiayaan Netto				
Penerimaan Pembiayaan	12,8	(22,8)	(874,5)	(294,8)
Pengeluaran Pembiayaan	(6,5)	194,9	(64,6)	41,3

Sumber: Data diolah, 2014

Bila dilihat berdasarkan urusan, maka belanja dapat dibagi menjadi belanja untuk Urusan Wajib dan belanja untuk Urusan Pilihan. Proporsi yang terbesar adalah untuk Urusan Wajib karena terkait dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Tabel 3.26
Belanja Urusan Wajib dan Pilihan
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 – 2013

Uraian	2010	2011	2012	2013
Urusan Wajib	467.343.760.757,98	545.353.223.807,10	557.940.820.818,25	687.224.330.248,17
Urusan Pilihan	38.858.835.866,00	43.779.497.400,00	47.942.881.966,00	51.816.438.994,00

Sumber: Dinas Pengelola Keuangan & Aset, 2014

Berdasarkan Tabel diatas, belanja urusan wajib dari tahun 2010 – 2013 trennya terus meningkat. Pada tahun 2010, belanja wajib sebesar Rp.467.343.760.757,98 dan tahun 2013 sebesar Rp.687.224.330.248,17 sedangkan belanja urusan pilihan pada tahun 2010 sebesar Rp.38.858.835.866,- dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 51.816.438.994,-.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f.</i>	<i>Ny</i>

Rincian realisasi belanja daerah dan belanja menurut urusan dapat dilihat pada tabel 3.27 dan 3.28 dibawah ini.

Tabel 3.27

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan

**Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2010 - 2013**

Uraian	Tahun 2010			Tahun 2011		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Belanja Tidak Langsung	233.834.621.601,98	223.060.673.986,62	95,39	247.506.136.422,10	239.035.375.584,88	96,58
a. Belanja Pegawai	194.824.621.601,98	185.936.834.176,00	95,44	221.349.136.422,10	213.896.748.161,00	96,63
b. Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	335.792.000,00	33,57	-	-	-
c. Belanja Hibah	10.200.000.000,00	10.090.822.000,00	98,93	6.440.000.000,00	6.389.449.000,00	99,25
d. Bantuan Sosial	10.450.000.000,00	9.557.225.810,62	91,46	9.100.000.000,00	8.249.678.423,88	90,66
e. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah an Desa	17.110.000.000,00	17.100.000.000,00	100,00	10.367.000.000,00	10.367.000.000,00	100,00
f. Belanja Tidak Terduga	250.000.000,00	30.000.000,00	100,00	250.000.000,00	132.500.000,00	53,00
Belanja Langsung	272.367.975.032,00	224.647.177.051,40	82,48	341.626.584.785,00	305.869.091.164,38	89,53
a. Belanja Pegawai	7.938.748.600,00	6.462.517.105,00	81,04	9.405.818.500,00	7.878.662.550,00	83,76
b. Belanja Barang dan Jasa	83.514.828.354,00	73.235.333.036,90	87,69	104.276.541.062,00	94.392.891.020,00	90,52
c. Belanja Modal	180.914.398.078,00	144.949.326.909,50	80,12	227.944.225.223,00	203.597.537.594,38	89,32

Uraian	Tahun 2012			Tahun 2013		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Belanja Tidak Langsung	295.305.321.745,25	287.411.585.986,30	97,33	350.361.356.597,17	337.676.647.605,23	96,38
a. Belanja Pegawai	251.084.903.245,25	245.719.679.974	97,86	281.306.943.187,17	267.277.207.963,99	95,01
b. Belanja Hibah	31.453.618.500,00	29.311.980.740,00	93,19	62.977.413.000,00	66.202.234.162,00	105,12
c. Bantuan Sosial	450.000.000,00	371.148.014,06	82,48	660.000.000,00	783.042.820,00	118,64
d. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah an Desa	10.917.000.000,00	10.687.027.258,24	97,89	4.917.000.000,00	3.300.512.659,24	67,12
e. Belanja Tidak Terduga	1.400.000.000,00	1.321.750.000,00	94,41	500.000.000,00	113.650.000,00	22,73

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b.</i>	<i>M.</i>

Uraian	Tahun 2012			Tahun 2013		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Belanja Langsung	310.578.181.039,00	285.803.120.478,49	92,02	388.679.412.645,00	336.493.380.745,28	86,57
a. Belanja Pegawai	10.973.712.100,00	9.243.152.184,00	84,23	28.754.818.500,00	26.262.122.971,00	91,33
b. Belanja Barang dan Jasa	113.846.985.078,00	101.253.058.365,00	88,94	127.219.097.843,50	100.919.211.180,00	79,33
c. Belanja Modal	185.757.483.861,00	175.306.909.929,49	94,37	232.705.726.251,00	209.312.046.594,28	89,95

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas

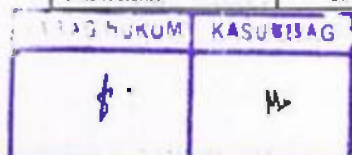
Tabel 3.28
Target dan Realisasi Belanja Menurut Urusan Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2010 – 2013

Uraian	Tahun 2010		Tahun 2011	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Urusan Wajib	467.343.760.767,98	413.126.443.830,95	589.132.721.207,00	544.904.466.749,26
Pendidikan	143.784.309.713,98	122.129.658.752,00	176.439.973.136,10	163.163.004.347,00
Kesehatan	36.531.844.400,00	34.177.507.538,00	42.297.804.735,00	39.145.717.427,00
Pekerjaan Umum	126.573.301.507,00	107.156.826.870,00	167.963.988.590,00	155.973.532.946,50
Perumahan	221.472.000,00	197.839.500,00	143.811.400,00	122.433.650,00
Penataan Ruang	-	-	1.635.000.000,00	1.080.870.000,00
Perencanaan Pembangunan	6.620.406.600,00	6.267.606.575,00	7.190.398.300,00	6.905.448.449,00
Perhubungan	5.522.083.448,00	5.225.025.341,00	4.148.508.000,00	3.394.600.305,00
Lingkungan Hidup	4.556.266.500,00	4.283.713.593,00	4.914.327.780,00	4.351.287.132,94
Pertanahan	1.214.925.000,00	1.035.672.000,00	958.100.000,00	866.728.400,00
Kependudukan & Catatan Sipil	2.801.263.600,00	2.666.028.620,00	3.042.303.000,00	2.813.501.091,00
Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	298.475.000,00	277.932.300,00	218.255.000,00	206.093.200,00
KB& Keluarga Sejahtera	1.391.425.000,00	1.295.017.000,00	1.560.438.740,00	1.311.554.000,00
Sosial	3.658.297.400,00	3.432.859.042,00	6.853.811.375,00	6.268.662.135,00
Ketenagakerjaan	593.000.000,00	586.928.400,00	837.349.000,00	829.468.500,00
Koperasi & UKM	3.921.522.600,00	3.748.339.868,83	4.143.289.000,00	3.941.386.916,94
Penanaman Modal	215.000.000,00	168.939.900,00	185.000.000,00	171.979.600,00
Kebudayaan	932.978.000,00	927.523.050,00	1.142.360.800,00	1.123.034.100,00
Kepemudaan & Olah Raga	1.273.059.100,00	1.203.471.751,00	3.123.244.200,00	2.995.554.397,00
Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	5.273.043.300,00	4.866.351.265,00	5.289.183.000,00	4.920.872.356,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah	114.511.425.699,00	106.820.502.450,62	104.586.479.391,00	98.452.606.036,88
Ketahanan Pangan	1.126.807.600,00	1.043.981.646,00	1.163.929.000,00	1.093.492.780,00
Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.469.158.900,00	3.888.425.536,00	5.129.335.860,00	4.703.289.842,00
Statistik	290.000.000,00	285.390.000,00	448.773.000,00	442.124.650,00
Kearsipan	19.888.000,00	19.735.000,00	22.030.000,00	22.030.000,00

KABAG HUKUM	KASUBAG
<i>f.</i>	<i>H.</i>

Uraian	Tahun 2010		Tahun 2011	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Komunikasi & Informatika	325.000.000,00	295.055.500,00	710.787.000,00	675.876.000,00
Perpustakaan	1.113.807.400,00	1.075.603.333,00	1.204.743.500,00	1.133.363.170,00
Urusan Pilihan	38.858.835.866,00	34.581.407.207,07	43.779.497.400,00	38.255.955.317,00
Pertanian	14.138.298.466,00	12.775.804.415,00	15.204.436.000,00	13.627.166.094,00
Kehutanan	12.260.546.200,00	10.137.303.611,00	12.594.311.000,00	9.399.238.095,00
Energy & Sumberdaya Mineral	6.020.972.400,00	5.573.812.578,07	6.364.935.000,00	5.968.938.644,00
Pariwisata	100.000.000,00	99.475.000,00	305.160.000,00	269.855.000,00
Kelautan dan Perikanan	4.161.393.100,00	4.060.487.603,00	6.962.699.400,00	6.711.913.434,00
Perdagangan	707.390.700,00	698.348.000,00	694.941.000,00	665.037.300,00
Industri	300.165.000,00	284.391.000,00	548.015.000,00	532.565.000,00
Ketransmigrasian	1.170.070.000,00	951.785.000,00	1.105.000.000,00	1.081.241.750,00

Uraian	Tahun 2012		Tahun 2013	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Urusan Wajib	557.940.820.818,25	413.126.443.830,95	687.224.330.248,17	629.131.771.876,51
Pendidikan	180.502.122.376,25	178.388.098.409,00	203.149.199.807,17	183.353.000.169,03
Kesehatan	50.068.477.800,00	44.135.642.699,00	66.121.450.880,00	59.421.787.129,00
Pekerjaan Umum	133.134.522.050,00	127.369.581.867,49	170.505.864.501,00	158.284.706.286,25
Perumahan	169.784.000,00	166.868.500,00	391.812.400,00	389.076.800,00
Penataan Ruang	2.040.000.000,00	1.387.562.200,00	-	-
Perencanaan Pembangunan	6.894.005.600,00	6.434.230.588,00	6.756.517.800,00	6.438.859.109,00
Perhubungan	5.351.205.200,00	5.218.788.187,00	5.084.134.360,00	4.957.354.025,00
Lingkungan Hidup	5.842.390.900,00	5.469.119.459,00	7.285.029.500,00	6.852.134.759,00
Pertanahan	730.500.000,00	445.643.450,00	425.000.000,00	121.293.500,00
Kependudukan & Catatan Sipil	5.395.355.000,00	4.967.516.018,00	4.455.939.700,00	4.282.356.698,00
Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	349.276.000,00	323.835.900,00	325.037.000,00	318.837.000,00
Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera	850.000.000,00	763.321.500,00	1.613.475.700,00	1.552.420.400,00
Sosial	7.614.900.800,00	6.897.141.778,00	9.924.039.500,00	9.711.403.559,00
Ketenagakerjaan	852.550.000,00	848.754.500,00	896.450.000,00	894.764.600,00
Koperasi & UKM	4.784.524.600,00	4.620.316.222,00	4.597.442.460,00	4.327.102.575,00
Penanaman Modal	185.000.000,00	150.951.600,00	213.250.000,00	198.689.600,00
Kebudayaan	1.217.907.500,00	1.202.872.650,00	2.314.394.400,00	1.917.760.100,00
Kepemudaan & Olah Raga	3.949.444.400,00	3.831.772.147,00	4.084.648.500,00	3.856.721.550,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	5.621.164.277,00	5.352.454.395,00	7.083.138.724,00	6.862.759.228,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah	133.333.839.818,00	125.570.734.687,30	182.680.378.194,00	166.512.374.260,23
Ketahanan Pangan	1.217.477.800,00	1.143.886.956,00	1.216.012.200,00	1.168.509.515,00
Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.926.927.000,00	5.142.767.964,00	5.523.470.500,00	5.204.432.875,00
Statistik	390.050.000,00	385.515.000,00	460.470.000,00	458.866.800,00
Kearifan	15.500.000,00	15.458.000,00	63.535.000,00	63.420.000,00
Komunikasi & Informatika	636.410.800,00	629.231.000,00	819.825.000,00	737.107.478,00
Perpustakaan	1.317.484.897,00	1.269.171.749,00	1.233.814.522,00	1.192.033.861,00
Urusan Pilihan	47.942.881.966,00	41.083.469.039,00	51.816.438.994,00	45.038.256.474,00
Pertanian	17.790.226.716,00	13.893.107.846,00	18.208.550.164,00	17.150.282.646,00



Uraian	Tahun 2012		Tahun 2013	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kehutanan	12.087.214.200,00	10.343.739.391,00	11.660.209.000,00	7.278.329.603,00
Energy & Sumberdaya Mineral	6.663.962.650,00	6.103.233.371,00	8.123.683.500,00	7.494.444.563,00
Pariwisata	2.183.600.000,00	2.131.850.000,00	1.024.395.500,00	926.293.000,00
Kelautan dan Perikanan	6.685.572.400,00	6.143.827.281,00	9.253.219.690,00	8.759.377.672,00
Perdagangan	687.791.000,00	646.679.700,00	1.329.696.800,00	1.291.891.000,00
Industri	621.515.000,00	607.043.500,00	722.254.340,00	632.326.690,00
Ketransmigrasian	1.223.000.000,00	1.213.987.950,00	1.494.430.000,00	1.466.311.300,00

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap penggunaan anggaran Kabupaten Gunung Mas bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Gunung Mas pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pembiayaan di masa mendatang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Analisis ini dapat dilihat pada struktur belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap total belanja, serta analisis belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur daerah, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.29
Struktur Belanja langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 - 2013

Uraian	Struktur (persen)			
	2010	2011	2012	2013
a. Belanja Pegawai	83,32	89,43	85,03	80,29
b. Belanja Subsidi	0,43	-	-	-
c. Belanja Hibah	4,36	2,60	10,65	17,97
d. Bantuan Sosial	4,47	3,68	0,15	0,19
e. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa	7,32	4,19	3,69	1,40
f. Belanja Tidak Terduga	0,11	0,10	0,47	0,14
Belanja Tidak Langsung	100,00	100,00	100,00	100,00

Uraian	Struktur (persen)			
	2010	2011	2012	2013
a. Belanja Pegawai	2,91	2,75	3,53	7,40
b. Belanja Barang dan Jasa	30,66	30,52	36,66	32,73
c. Belanja Modal	66,42	66,72	59,81	59,87
Belanja langsung	100,00	100,00	100,00	100,00

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↳	↳

	2010	2011	2012	2013
a. Belanja Tidak Langsung	46,19	42,01	48,74	47,41
b. Belanja Langsung	53,81	57,99	51,26	52,59
Total Belanja	100,00	100,00	100,00	100,00

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi belanja pegawai (gaji dan tunjangan) merupakan komponen terbesar dari belanja tidak langsung selama 2010-2013, namun trendnya fluktuatif, yaitu 83,32 (2010), 89,43 (2011), 85,03 (2012) dan 80,29 (2013). Sementara belanja langsung proporsi terbesar yaitu belanja modal dengan komposisi 66,42% (2010), 66,72% (2011), 59,81%(2012) dan 59,87% (2013).

3.2.2. Analisis Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Aparatur.

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur merupakan belanja tetap yang harus dialokasikan setiap tahun untuk mencukupi kebutuhan aparatur pemerintahan. Rincian alokasi belanja untuk pemenuhan aparatur selama 2010-2013 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.30
Analisis Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 - 2013

Uraian	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Belanja Tidak Langsung				
a. Gaji dan Tunjangan	130.771.993.963,-	213.896.748.161,-	171.563.182.736,-	184.775.858.614,-
b. Tambahan Penghasilan PNS	53.091.507.340,-	58.008.119.650,-	72.077.998.531,-	80.126.883.771,-
c. Belanja Penerimaan lainnya pimpinan & anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.188.000.000,-	1.398.000.000,-	1.301.400.000,-	1.414.800.000,-
d. Biaya pemungutan pajak daerah	885.332.873,-	525.989.913,-	627.165.732,-	641.586.389,-
e. Insentif pemungut pajak dan /atau retribusi daerah	-	100.000.000,-	149.932.975,-	318.079.249,99
Belanja Langsung				
Belanja Pegawai :				
a. Honorarium PNS	422.875.000,-	366.684.000,-	297.123.900,-	918.698.650,-
b. Honorarium Peg. Honorer	3.719.967.150,-	4.632.202.200,-	5.524.291.150,-	10.045.136.757,-
c. Uang Lembur	336.172.083,-	338.699.750,-	346.776.634,-	501.556.364,-
d. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Bimtek PNS	332.330.000,-	1.105.758.000,-	1.174.206.500,-	396.090.000,-
Belanja Barang dan Jasa :				
a. Belanja Premi asuransi	567.985.150,-	634.693.055,-	1.022.167.500,-	1.741.968.550,-
b. Belanja makan dan minuman harian pegawai	52.954.000,-	63.020.000,-	47.360.000,-	45.765.000,-
c. Belanja Pakaian Dinas & Atributnya	1.240.612.300,-	1.714.648.900,-	714.341.200,-	1.149.561.950,-
d. Belanja Pakaian khusus hari-hari tertentu	796.847.000,-	685.289.800,-	806.978.000,-	1.056.479.050,-
e. Belanja Perjalanan Dinas	24.750.708.881,-	26.535.151.609,-	32.817.880.086,-	34.461.061.082,-
f. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	807.520.000,-	784.000.000,-	808.300.000,-	1.078.000.000,-
g. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	2.181.355.000,-	2.476.537.500,-	2.964.610.000,-	3.239.640.000,-
h. Belanja Perjalanan Pindah Tugs	85.532.500,-	66.990.000,-	89.940.000,-	148.767.500,-
i. Belanja Pemulangan	472.850.000,-	415.100.000,-	607.000.000,-	731.050.000,-

KABAG HUKUM	KASUBAG
<i>h</i>	<i>h</i>

Uraian	Tahun			
	Pegawai			
Total	221.704.543.240,	313.747.635.538,	292.940.654.944,	322.790.985.926,9 9

Sumber: DPKA, 2014

Sementara proporsi untuk pemenuhan belanja aparatur 4 (empat) tahun terakhir bisa dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 3.31
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 - 2013

No.	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp.)	Total pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
1	Tahun Anggaran 2010	221.704.543.240,-	451.332.851.038,02,-	49,1
2	Tahun Anggaran 2011	313.747.635.538,-	650.564.299.954,26,-	48,2
3	Tahun Anggaran 2012	292.940.654.944,-	583.207.743.954,79,-	50,2
4	Tahun Anggaran 2013	322.790.985.926,99	675.119.465.687,85,-	47,8

Sumber: Data diolah, 2014

Berdasarkan tabel diatas, tahun 2010 proporsi atau persentase belanja aparatur terhadap total pengeluaraterjadi fluktuatif. Tahun 2010 sebesar 49,1persen turunmenjadi 48,2 persen pada tahun 2011 dan tahun 2012 naik menjadi 50,2 persen serta terjadi penurunan kembali di 2013menjadi 47,8 persen. Kondisi ini memperlihatkan bahwasetiap tahun , belanja pada APBD Kabupaten Gunung Mas sebagian besar masih dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pemenuhan aparatur, akan tetapi secara bertahap mengalami penurunan, sekalipun belum signifikan. Dengan demikian diharapkan akan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi kebutuhan pembiayaan publik.

3.2.3. Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat

KABAG HUKUM	KASUBAG
<i>b.</i>	<i>h.</i>

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemkab Gunung Mas. Sementara belanja prioritas adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh pemerinth daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar. Adapun gambaran umumnya seperti tabel dibawah ini.

Tabel 3.32
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 – 2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	Rata2 pertumbuhan
A	Belanja Tidak Langsung	302.728.524.128,52	341.174.429.154,88	396.586.046.535,30	330.073.641.925	7,1
B	Belanja Langsung	224.647.177.051,40	305.869.091.164,38	285.803.120.478,49	338.973.855,126	15,1
C	Pembiayaan Pengeluaran	3.625.000.000,00	3.388.279.635,00	9.993.037.490,00	6.071.968.636	41,3
TOTAL (A+B+C)		531.000.701.179,92	650.431.799.953,26	692.372.204.423,79	675.119.465,687	

Sumber: Data diolah

3.2.4. Analisis Proyeksi Belanja Daerah

Analisis ini diperlukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung serta pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas program utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Adapaun gambaran umum sebagaimana tabel dibawah ini.

KABAG HUKUM	KASUBAG
6.	11

Tabel 3.33
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat,
serta Prioritas Utama Kabupaten Gunung Mas 2015 - 2019

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan

No	Uraian	Data Dasar Tahun 2013	Tingkat Pert (%)	Proyeksi				
				2015	2016	2017	2018	2019
A	Belanja Tidak Langsung	330.073.641.925	7	357.935.376.779,15	393.728.914.457,07	433.101.805.902,77	476.411.986.493,05	524.053.185.142,35
B	Belanja Langsung	338.973.855.126	15	436.828.593.584,00	480.511.452.942,40	528.562.598.236,64	581.418.858.060,30	639.560.743.866,33
C.	Pengeluaran Pembiayaan	6.071.968.636	15	12.200.000.000,00	13.420.000.000,00	14.762.000.000,00	16.238.200.000,00	17.862.020.000,00
	TOTAL Belanja Wajib dan Pengeluaran yg Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	675.119.465.687		806.963.970.363,15	887.660.367.399,47	976.426.404.139,41	1.074.069.044.553,35	1.181.475.949.008,69

Sumber: data diolah, 2014

3.3. Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2011 – 2013 terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui:

3.3.1. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil.

Analisis dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.34
Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2011 – 2013
Kabupaten Gunung Mas

No	Uraian	Tahun		
		2011	2012	2013
1	Realisasi Pendapatan Daerah	533.076.340.963,52	570.979.558.288,28	667.575.251.060,51
	Dikurangi realisasi :			
2	Belanja Daerah	647.176.020.319,26	573.214.706.464,79	674.170.028.350,51
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.388.279.635	9.993.037.490	6.071.968.636
A	Defisit Riil	(117.487.958.990,74)	(12.228.185.666,51)	(14.724.236.785,76)
	Ditutup oleh realisasi/ Penerimaan Pembiayaan			
4	Sil.PA thn sebelumnya	63.937.082.222,10	48.862.921.831,25	29.603.799.195,4
5	Pencairan Dana Cadangan			5.000.000.000
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah			
7	Penerimaan Pinjaman			

KAB. G. HUKUM	KASUBAG
6	N

8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	142.245.029,89	598.583.957	72.368.487
9	Penerimaan Piutang Daerah			
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	64.079.327.251,99	49.461.505.788,25	34.676.167.682,4
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	(53.408.631.738,75)	37.233.320.121,74	19.951.930.596,64

Sumber: DPKA, 2014

Selama kurun waktu 2011-2013, APBD Kabupaten Gunung Mas selalu mengalami defisit anggaran pada tahun 2011-2013, seperti yang tergambar dalam tabel diatas. Berdasarkan gambaran diatas, maka perlu disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil sebagai berikut.

Tabel 3.35
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Gunung Mas 2011 - 2013

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil (%)		
		2011	2012	2013
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	(54)	(400)	(201)
2	Pencairan Dana Cadangan	--		
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-		
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-		
5	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	(0,12)	(4,90)	(0,49)
6	Penerimaan Piutang Daerah	-		
7	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	45,5	(304,49)	(169,08)

Sumber: DPKA, 2014

3.3.2. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis ini untuk memberikan gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. dengan mengetahui SILPA realisasi anggaran periode 2011-2013, maka dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.36
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2011 - 2013
Kabupaten Gunung Mas

No.	Uraian	2011		2012		2013		Rata2 pert
		Rp.	% dari SILPA	Rp.	%	Rp.	%	
1	Jumlah SILPA	63.937.082.222,10	(119,7)	48.862.921.831,25	131,2	29.603.799.195,4	118,9	43,5
2	Pelampauan penerimaan PAD	1.854.173.324,480	(3,5)	636.860.651	1,7	12.604.826.311	50,6	146,6
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	5.843.241.821	(10,94)	1.501.079.774	4,03	(13.120.110.272)	(52,70)	(19,87)
4	Pelampauan penerimaan	1.284.574.211,78	(2,41)	1.509.508.369,49	4,05	11.436.169.848,02	45,94	15,86

KABUPATEN GUNUNG MAS	KASUBAG
f.	h.

	lain-lain pendapatan daerah yg sah							
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-		-		-		
6	Kewajiban kpd pihak ke 3 sampai dengan akhir tahun belum terselsaikan	-		-		-		
7	Keg.Lanjutan	-		-		-		

Sumber: DPKA, 2014

3.4. Proyeksi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 - 2019

Kebijakan Anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah harus secara terus menerus diupayakan peningkatannya sehingga diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap penerimaan dari pemerintah pusat. Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan eksentifikasi.

A. Intensifikasi

Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan dengan lebih giat, ketat, dan teliti. Upaya intensifikasi mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalia. Aspek-aspek tersebut dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penyesuaian aspek kelembagaan/organisasi pengelola pendapatan asli daerah sesuai dengan kebutuhan yang berkembang dengan berorientasi fungsi-fungsi (*by function*) sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat yang mengarah pada pola koordinasi yang lebih terarah, sistem pengawasan menjadi

ABD. HUKUM	KASUBBAG
t.	h.

lebih baik dan akan memberikan dampak pada peningkatan pendapatan asli daerah karena dapat mendorong terciptanya :

- peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
- peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi daerah;
- peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya;
- peningkatan sistem pembukuan yang akan memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya.

2. Penyesuaian aspek ketatalaksanaan baik administrasi maupun operasional yang meliputi penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan, penyesuaian tarif, dan penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan.

3. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian.

Sebaik apapun perencanaan jika tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana. Penyimpangan dari prosedur yang ditentukan atau penyimpangan-penyimpangan lainnya yang dapat merugikan pemerintah daerah, untuk itu diperlukan pengawasan dan pengendalian yang meliputi :

- Pengawasan dan Pengendalian Yuridis

Pengawasan dan pengendalian yuridis diarahkan pada proses pemungutan pendapatan asli daerah (pajak dan retribusi) agar mengacu pada undang-undang atau peraturan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada;

- Pengawasan dan Pengendalian Teknis

Pengawasan dan pengendalian teknis menitikberatkan pada pelaksanaan pemugutan dengan sasaran menyempurnakan sistem dan prosedur pungutan dan pembayaran serta peningkatan pelayanan yang cepat dan cermat kepada para wajib pajak/wajib retribusi.

- Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan

Pengawasan dan pengendalian ini lebih ditujukan pada kegiatan para pelaksana dan ketertiban administrasi.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>B</i>	<i>M</i>

4. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Pendapatan

Peningkatan sumber daya manusia merupakan fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan pendapatan daerah dalam menggerakkan dan mengerahkan sumber daya pegawai dalam organisasi agar berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini antara lain dengan mengikutsertakan aparat dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD) serta program-program pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.

5. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
7. Meningkatkan pemanfaatan barang milik daerah;
8. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan para stakeholder pendapatan daerah
9. Fasilitasi peningkatan kinerja pengelola pendapatan daerah

B. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Dalam upaya ekstensifikasi ini tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pokok nasional, yakni pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan masyarakat.

Upaya ekstensifikasi pajak, tidak cukup hanya mengandalkan kondisi sarana prasarana daerah yang ada seperti saat ini. Prioritas pembangunan daerah harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat, serta tetap memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

KABUPATEN HUKUM	KASURBAG
B.	W.